UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA PADA PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Anjelina Ade Irma Suryani Br Barus¹, Inri Januar², Lonna Yohanes Lengkong³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *The components of corruption crimes are regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, especially in the provisions of Articles 2 and 3. According to the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 25/PUU-XIV/2016, the term "may" in Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes does not have binding legal force because contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Law became a material rather than formal offense after the Constitutional Court's decision. In addition, the author also formulates problems related to the prosecutor's indictment that uses the provisions of Article 2 Paragraph (1) of the Corruption Law to the defendant who is a village head whether it is appropriate to use the provisions of the article.*

Keywords: *Corruption Crimes; Elements; Article 2 and Article 3.*

How to Site: Anjelina Ade Irma Suryani Br Barus, Inri Januar, Lonna Yohanes Lengkong (2024). Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Pada Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp xx-xx. DOI.10.55809

Introduction

Pengertian dasar Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki arti besar bahwa dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum mendapatkan tempat yang paling tinggi serta terhormat. Dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan dan juga urusan kenegaraan yang diakui secara formal maupun material, landasan normatif dihadirkan guna menuntun segala aktivitas kehidupan sehingga ada kewajiban bagi setiap orang yang ada di bumi untuk mematuhi hukum yang berlaku. Negara yang berdasarkan hukum adalah negara yang memiliki sanksi yang bersifat tegas apabila masyarakat melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara serta memiliki aspek yang bersifat memaksa dan mengikat untuk mengatur segala perilaku dan kegiatan masyarakat.

Tegaknya norma dan kaidah hukum dalam setiap kehidupan masyarakat bertujuan untuk dapat menghadirkan rasa kenyamanan dan keamanan berupa perlindungan dan petunjuk bagi warga masyarakat, di sisi lain hukum pun hadir sebagai akibat atas penderitaan bagi seseorang yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan dan

menerima sanksi atas dilanggarnya aturan atau norma hukum tertentu.¹ Adapun sanksi-sanksi hukum dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, hingga diterapkannya sanksi pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi. Korupsi menjadi salah satu penyebab utama proses pemiskinan yang menyebabkan kemiskinan semakin tidak terbatas, pelayanan publik yang tidak optimal, infrastruktur yang tidak memadai, dan terjadinya eksploitasi sumber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kesejahteraan publik.

Dana Desa adalah uang negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer, Dana Desa pada ketentuan Pasal 1 angka 32 diartikan sebagai: "Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat." Untuk meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan ketepatan kerja dalam menjalankan penggunaan dana desa, maka dibentuklah peraturan khusus tentang dana desa yang merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa sebuah peraturan tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran dana desa.²

Penggunaan dana desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai praktik penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.³ Prodjudikoro mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan tindak pidana. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan apapun yang menyebabkan pelaku dapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi.⁴

Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh pemerintah harus menjadi perhatian dari berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama memantau

---

¹ Novendri M Nggilu. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. *Lambung Mangkurat Law Journal*. Volume 5 Issue 2. Hlm. 109-121. Terdapat dalam: <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/>, diakses tanggal 30 November 2023

² Tri Novita Sari Manihuruk. (2019). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar". *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 1 No. 1. hlm. 86. Terdapat dalam: <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2895>, diakses 20 Juni 2023

³ Kadir Yusrianto dan Roy Marthen Moonti. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS*. Vol. VI Nomor 3. Hlm. 431. Terdapat dalam: <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583> diakses 20 Juni 2023

⁴ Taufikqurrahman dan E. Bali. (2021). Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rectum*. Vol. 3 No. 1. Hlm. 121-122. Terdapat dalam: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.824> diakses 20 Juni 2023

dan mengelola dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. KPK mencatat, selama periode tahun 2015-2022 ada 601 (enam ratus satu) kasus korupsi dana desa dengan jumlah tersangka mencapai 686 (enam ratus delapan puluh enam). Hal ini membuat penyelewengan pengelolaan keuangan desa masuk dalam daftar tiga teratas kasus korupsi di Indonesia.⁵ Dari tindak korupsi dana desa akan berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa.

Penyalahgunaan kekuasaan berdampak pada terjadinya tindak pidana korupsi yang banyak terjadi di daerah-daerah yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan daerah. Bahkan dewasa ini korupsi telah banyak terjadi hingga ke susunan desa yaitu pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Semakin meningkatnya tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala desa dapat dilihat dari banyaknya perkara yang diadili oleh hakim di pengadilan, terkhususnya Pengadilan Negeri Semarang yang menyangkut tindak pidana korupsi dana desa dalam penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa. Tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tersebut dilakukan oleh XXXX, kecamatan XXXX, kabupaten XXXX dengan periode jabatan tahun XXXX-XXXX. Dalam hal ini, XXXX melakukan korupsi dana desa dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 170.620.867,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Dari pernyataan permasalahan korupsi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai korupsi dan membuat karya ilmiah dengan 2 (dua) rumusan masalah yakni apa pengertian Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK dan Apakah dakwaan Jaksa memasukan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah tepat, yang menggunakan 2 (dua) teori sebagai pisau analisis yakni Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Kepastian Hukum, yang mana dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Discussion

Sub-heading of the discussion

Dari tahun ke tahun, tingkat korupsi di Indonesia terus meningkat baik dari segi jumlah kasus dan kerugian keuangan negara. Tindak pidana korupsi semakin teratur dan mencakup seluruh aspek kehidupan Masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan undang-undang memberantas korupsi untuk mewujudkan Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.⁶ Menyadari kerumitan masalah korupsi di tengah-tengah krisis di berbagai dimensi serta dampak yang nyata

---

⁵ Willy Medi C. Nababan, 2023, "Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat", (diakses pda 06 Juni 2023, Pukul 19:32) Terdapat dalam:
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/rawan-korupsi-pengawasan-dana-desa-harus-diperkuat>, diakses 20 Juni 2023

⁶ Doni E. Saputra, 2018, Implikasi Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 18

dan pasti dari kejahatan ini. Akibatnya, korupsi dapat dikategorikan sebagai masalah nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui berbagai keseimbangan langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua kemampuan yang ada dalam masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Konsiderans Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan: "Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." Pada dasarnya, tindak pidana korupsi adalah sama dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta tindak pidana lainnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 209, 210, 387, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa korupsi merugikan keuangan negara, sedangkan penggelapan merugikan keuangan perusahaan swasta.⁷

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi dan penggelapan, keduanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, atau pegawai swasta. Menurut Lord Acton, karena mereka adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara, mereka cenderung melakukan korupsi, dan melakukan korupsi berdampak negatif pada ekonomi negara.¹³⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengartikan:

1. "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya PPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan."

---

⁷ Rixy Fredo Soselisa, 2015, Suatu Kajian Tentang Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Volume 4 Nomor 5, hlm. 64 Terdapat dalam: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/9008/8562> , diakses pada 18 Januari 2024

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membahas konsep kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang berbunyi: Pasal 2 Ayat (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000,00 (satu milyar rupiah)." Pasal 3 "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Penjelasan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), yang menunjukkan bahwa penambahan kata "dapat" menunjukkan bahwa, sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yang berarti bahwa hanya dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dimaksud, bukan dengan timbulnya konsekuensi. Penjelasan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat."

Karena interpretasi yang berbeda dari kata "dapat" terkait elemen merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, seringkali muncul pertanyaan seperti bagaimana menghitung jumlah kerugian negara yang sebenarnya dan lembaga mana yang berwenang menghitungnya. Namun, rumusan kerugian negara ini merupakan komponen dari kasus tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karena itu, penggunaan kata "dapat" dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan yang diberikan dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Selain itu, istilah "dapat" yang digunakan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang

memerlukan peraturan yang ditulis (*lex scripta*), ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak ditafsirkan secara berlebihan (*lex certa*). Oleh karena itu, ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Namun, ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefinisikan: "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai." Dengan demikian, konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yang berarti bahwa suatu tindakan dapat dianggap merugikan negara dengan syarat harus ada kerugian negara yang nyata. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi, kalimat "secara nyata telah ada kerugian negara", sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan, didefinisikan sebagai kerugian yang dapat dihitung secara matematis berdasarkan hasil penyelidikan akuntan publik atau instansi yang berwenang.⁹ Menurut rumusan norma ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kedua pasal menganut delik formil yang membawa akibat bahwa seseorang dianggap tersangka jika sudah menyelesaikan rangkaian perbuatan yang dimaksudkan. Karena itu, kata "dapat" menunjukkan bahwa konsekuensi "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak harus terjadi secara langsung. Yang penting, rangkaian perbuatan pelaku sudah sesuai dengan rumusan delik dan memiliki peluang untuk merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berbagai pendapat pro dan kontra telah muncul melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang bagaimana menangani masalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berkaitan dengan kata-kata "dapat merugikan keuangan negara" dan "atau orang lain atau suatu korporasi", yang menjadi dasar permohonan judicial review ini. Sementara delik materiil menekankan pada akibat yang dilarang, pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu, akibat tidak merupakan syarat selesainya delik. Akibat harus ada dalam delik materiil. Akibat yang dilarang dalam rumusan delik harus benar-benar terjadi sebelum delik materiil dianggap selesai. Jika pelaku telah melakukan seluruh atau rangkaian perbuatan yang diperlukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi karena suatu hal akibat yang dilarang tidak terjadi, delik hanyalah percobaan.¹⁰

Menurut Mahkamah Konstitusi, menerapkan elemen kerugian keuangan bersama dengan gagasan kerugian sebenarnya lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan

---

⁸ Pujiyono. (2017). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25-PUU/XIV/2016 Terhadap Pergeseran Konsep Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. (Master Thesis). Data Base (ID Code No. 61632) Terdapat dalam: <http://eprints.undip.ac.id/61632/>

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

sesuai dengan upaya harmonisasi dan sinkronisasi sistem hukum nasional dan internasional. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Akibatnya, ide tentang kerugian keuangan negara dianut dalam arti delik materiil, yang berarti bahwa hanya jika ada kerugian keuangan negara yang sebenarnya, suatu tindakan dapat dianggap merugikan keuangan negara.¹¹ Dengan demikian, ada alasan mendasar untuk mengubah penilaian konstusionalitas putusan sebelumnya karena perubahan dalam peraturan dan penerapan elemen merugikan keuangan negara telah menimbulkan keraguan hukum dan ketidakadilan dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, istilah "dapat" yang digunakan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menerima permohonan pemohon karena beralasan secara hukum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil yang berfokus pada akibat, yaitu kerugian keuangan yang sebenarnya.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 3 dari Undang Undang Tindak Pidana Korupsi mencakup salah satu dari tiga puluh jenis tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Ketentuan-ketentuan ini telah menjadi subjek perdebatan dan bahkan telah diuji di Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 17 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk melakukan peninjauan hukum terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa istilah "dapat" yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam kalimat pertama Penjelasan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ada persoalan konstusional karena ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan melindungi hak konstusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Dalam bidang hukum pidana, ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP berfungsi sebagai asas legalitas, yang berarti bahwa orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar undang undang yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, harus ada elemen melawan hukum yang harus ditetapkan secara tertulis sebelum tindak pidana dapat dituntut dan diadili.

---

¹¹ Kiki Kristanto, (2019), Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. Volume 4 Nomor 2, hlm. 566 Terdapat dalam:
<https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/82> diakses pada 5 Juni 2024

Mahkamah Konstitusi menerima permohonan untuk menghapus frasa "dapat" dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara sering disalahgunakan oleh tindak pidana korupsi sebagai delik formil. Tindak pidana korupsi juga dapat dikenakan terhadap bisnis yang merugikan keuangan negara. Meskipun tidak ada unsur niat untuk merugikan keuangan negara, pejabat publik takut mengambil keputusan karena kondisi ini membuat mereka khawatir tentang potensi hukuman tindak pidana korupsi.
2. Setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan, Mahkamah menilai bahwa itu mengubah kerangka berpikir terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan elemen kerugian keuangan negara. Mereka menetapkan bahwa kerugian keuangan negara adalah kerugian yang nyata jumlahnya. Karena ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 sering digunakan untuk menjerat berbagai pelanggaran yang dianggap berdampak negatif terhadap keuangan negara, MK menganggap hal itu lebih memberikan kepastian hukum.
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa "dapat" berarti mampu, sanggup, bisa, boleh, mungkin, dinilai multitafsir, dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memenuhi prinsip perumusan tindak pidana, yang menyatakan bahwa hukum harus tertulis dan tidak dimultitafsir.
4. Upaya untuk sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti ketentuan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003, yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dihapus frasa "dapat".

Unsur "dapat merugikan keuangan negara" berarti merugikan keuangan negara secara langsung atau tidak langsung. Pada dasarnya, apabila suatu tindakan otomatis berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara, tindakan tersebut dapat dianggap merugikan keuangan negara. Dengan demikian, kenyataan bahwa ada atau tidaknya kerugian keuangan negara menjadi tidak penting. Oleh karena itu, kerugian keuangan negara tidak benar-benar diperlukan selama ada bukti yang mendukung kemungkinan kerugian tersebut. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kata "dapat" dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan undang-undang yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Menurut penulis, dalam hal pengertian ketentuan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kepastian hukum sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan oleh Fence M. Wantu yang mengatakan bahwa apabila hukum tidak memiliki nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum yang juga sebagai kejelasan norma yang dapat

digunakan sebagai pedoman bagi Masyarakat yang dikenakan peraturan ini dan salah satu poin yang menurut penulis sangat penting adalah salah satu cara untuk memahami istilah kepastian adalah dengan mengatakan bahwa Masyarakat memiliki keyakinan yang kuat bahwa hukum harus diterapkan agar tidak sering menyebabkan salah tafsir.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki delik formil yang secara gramatikal, membawa konsekuensi bahwa seseorang dianggap tersangka jika telah menyelesaikan rangkaian perbuatan yang dimaksudkan. Karena itu, kata "dapat" menunjukkan bahwa konsekuensi yang "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak harus terjadi. Yang penting adalah bahwa rangkaian tindakan pelaku sudah sesuai dengan rumusan delik dan bahwa tindakan tersebut memiliki peluang untuk merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Penjelasan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut adalah agar tindak pidana korupsi dapat dilakukan hanya dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibatnya, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa negara mengalami kerugian nyata.

Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam salah satu putusannya bahwa penerapan elemen kerugian negara dengan menggunakan konsep kerugian yang nyata memberikan kepastian hukum yang lebih adil dan sesuai dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, frasa "dapat" dalam kalimat "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" harus dianggap sebagai salah satu elemen delik, baik secara faktual maupun kontekstual. Karena dalam kenyataannya, sangat sulit untuk mengetahui berapa banyak kerugian ekonomi atau keuangan negara. Bahkan ketika kata "dapat" tidak ada lagi, upaya untuk memperbaiki kerugian keuangan atau perekonomian negara menjadi tidak mungkin karena harus menunggu tindak pidana korupsi dilakukan dengan sempurna, yang artinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dipastikan telah terjadi.¹² Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga akan mengubah sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum, terkait dengan sinkronisasi hukum nasional. Proses penegakan hukum dapat terhambat oleh asumsi frasa "dapat" yang harus dibuktikan dengan kerugian ekonomi atau keuangan negara. Kewenangan lembaga negara untuk menunjukkan kerugian keuangan nyata ini masih ambigu. Hal ini telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang menegaskan bahwa penyidik korupsi berhak melakukan koordinasi dengan lembaga apa pun, termasuk BPK dan BPKP, atau Lembaga lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan kerugian suatu negara.¹³

---

¹² Fatkhurohman. 2017. Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV 2016. Jurnal Konstitusi. Volume 14 Nomor 1. Hlm. 10 Available from: <https://doi.org/10.31078/jk1411>

¹³ *Ibid.*

Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan adalah salah satu alasan hukum Pemohon menganggap frasa "dapat" dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan munculnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ditekankan bahwa ASN melakukan kesalahan administratif atau melakukan kesalahan administrasi saat menjalankan administrasi negara. Akibatnya, metode yang digunakan adalah pendekatan administratif. Menurut ketentuan Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pendekatan pidana adalah opsi terakhir. Dua interpretasi akan muncul dari pernyataan ini yaitu penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum. Menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang adalah tindakan atau keputusan yang melampaui wewenang. Akibatnya, konsekuensi hukum dari penyalahgunaan wewenang dibatalkan oleh pengadilan administratif, dalam hal ini PTUN.¹⁴ Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, bersama dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (4) dan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di atas, ada perbedaan mendasar antara melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Pertama, aspek niat mereka berbeda. Ada unsur kesalahan dalam diri seseorang yang ingin memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara yang merugikan keuangan negara, sehingga perbuatan melawan hukum dapat dipastikan. Sementara itu, jika terjadi penyalahgunaan wewenang, mungkin ada unsur kesalahan, tetapi belum tentu ada niat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan sehingga merugikan keuangan negara.

Kedua, aspek konsekuensi dari tindakan. Perbuatan melanggar hukum biasanya mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, dalam hal ini negara kehilangan uang. Sementara penyalahgunaan wewenang sering mengakibatkan kerugian administratif. Karena itu, frasa "dapat" yang digunakan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak tepat jika maknanya ditafsirkan ke dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Karena keduanya dibangun berdasarkan prinsip hukum yang berbeda, tidak ada relasi di antara mereka. Pemohon berpendapat bahwa kriminalisasi terjadi karena penegak hukum sering mendakwa ASN karena dianggap mengeluarkan kebijakan yang merugikan keuangan negara dalam konteks putusan MK ini. Namun, penegakan hukum dilakukan untuk membantu organisasi maju dan mencegah penyimpangan keuangan negara yang harus mereka kelola.¹⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, dalam hal ini aparat penegak hukum tidak bisa melakukan kriminalisasi semata karena dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang diberikan, sesuai dengan teori yang diberikan oleh Ruslan Saleh seorang terdakwa harus melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Oleh sebab itu, jika aparat hukum memberikan dakwaan terhadap ASN maka dalam hal tersebut seorang aparat penegak hukum melihat unsur-unsur yang dilakukan seorang ASN sudah memenuhi untuk dimintai pertanggungjawaban.

---

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13-14.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 17.

Secara substansial, tidak ada hubungan langsung antara frasa "dapat" yang digunakan dalam ketentuan Pasal 3 UU Tipikor dan frasa "dapat" dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang mendukung kriminalisasi ASN yang mengeluarkan kebijakan yang diskresi. Hikmahanto Juwana menekankan bahwa yang perlu diperhatikan bukanlah kebijakan yang salah atau merugikan, tetapi niat jahat pengambil kebijakan. Itu bukan karena kebijakan diskresi yang menyebabkan masalah bagi ASN, tetapi karena keinginan dasar pengambil kebijakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang akan menyebabkan didakwa dengan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sub-heading of the discussion

Kasus Posisi yang dapat diuraikan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut:

Terdakwa XXXX merupakan Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX periode XXXX sampai dengan XXXX. Pada Tahun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Desa sebesar Rp. 814. 189.000 (delapan ratus juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Pada bulan April 2017, XXXX selaku Pelaksana CV. XXXX dipanggil ke Kantor Balai Desa XXXX dan ditunjuk untuk mengerjakan kegiatan fisik Dana Desa XXXX Tahap I. Pada tanggal 19 Juni 2017, XXXX selaku Kaur Keuangan Desa XXXX diperintahkan oleh XXXX untuk membuat Proposal Penyaluran Dana Desa Tahap I disertai dengan Rencana Anggaran dan Biaya senilai Rp. 488.513.400,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) dan setelah melewati beberapa tahap dan proses, pada Tanggal 24 Juli 2017 Dana Desa XXXX Tahap I masuk ke rekening atas nama Pemerintahan Desa XXXX dan kemudian dicairkan oleh XXXX bersama XXXX di Bank Jateng.

Setelah melakukan penarikan Dana Desa tahap I tersebut, XXXX melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai sendiri Dana Desa dan tidak menyerahkannya kepada Edy Supriyanti selaku Bendahara Desa untuk digunakan kegiatan Dana Desa. Setelah menguasai uang penarikan dari Dana Desa tersebut, XXXX telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membayarkan Sebagian untuk kepentingan kegiatan pekerjaan fisik Dana Desa XXXX Tahap I kepada XXXX secara bertahap sebesar Rp. 277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan dari besaran ini ternyata XXXX hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah). Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Dana Desa Tahap I, terdapat pekerjaan yang tidak selesai yaitu Pembangunan Drainase di RT. 03/01 dan Pavingasi di RT. 02/01, RT. 03/01, RT. 10/03 karena uang Dana Desa digunakan oleh XXXX untuk kepentingan sendiri. Akibatnya pada tanggal 08 Januari 2019, Tim Teknik dari Dinas Pekerjaan Umum melakukan pemeriksaan fisik atas kegiatan Dana Desa XXXX. Kesimpulannya, Pada tanggal 21 Juni 2019 ada kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Dana Desa XXXX Tahap I sebesar Rp. 170.620.867,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pada tanggal 6 Desember 2019, XXXX ditetapkan sebagai terdakwa tindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pada Dana Desa XXXX Tahap I Tahun 2017. XXXX melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembahasan:

Jaksa memiliki wewenang penuntutan. Selain melakukan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum juga harus melakukan prapenuntutan, yaitu tindakan penuntut umum, untuk memberi petunjuk untuk penyidikan yang lebih baik. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum memeriksa berkas perkara penyidik untuk memastikan apakah telah memenuhi persyaratan formal dan material. Dari hasil penyidikan ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan.¹⁶ Dengan statusnya sebagai negara hukum, Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan mengadili pelanggaran hukum. Jaksa Penuntut Umum adalah lembaga penegak hukum di Indonesia yang bertugas melakukan penuntutan dan mengawasi pencapaian tujuan hukum. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jaksa Penuntut Umum adalah salah satu lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.¹⁷

Jaksa Penuntut Umum berhak memberikan dakwaan dalam kasus tindak pidana korupsi, tetapi seperti yang terlihat dalam kasus-kasus saat ini, Jaksa Penuntut Umum sering lalai dan tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan tentang dakwaan. Dalam kasus tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum kadang-kadang kurang tegas dalam memberikan dakwaan dan memproses kasus. Sudah jelas bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terjadi tanpa upaya aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Jaksa Agung bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Tipikor. Pasal ini memberikan kewenangan kepada jaksa agung untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta melakukan eksekusi atas keputusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Semarang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg, surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah:

1) Dakwaan Primair

Bahwa terdakwa XXXX telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahana as Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

¹⁶ Yessy Paramita Samadi. 2015. Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Volume 4 Nomor 2, hlm. 2 Terdapat dalam:

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7780> diakses pada 25 Juni 2024

¹⁷ *Ibid.*

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan Analisa bahwa terdakwa XXXX selaku Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX periode 2013 sampai dengan 2019, dalam rentang waktu dalam tahun 2017 sampai 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, secara melawan hukum telah melaksanakan Dana Desa Sidorjo Tahap I Tahun 2017 tidak sesuai peruntukannya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 170.620.867,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 170.620.867,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil Audit PENGHITUNGAN Kerugian Negara dari BPK dan BPKP perwakilan Jawa Tengah.

2) Dakwaan Subsidair

Bahwa terdakwa XXXX telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan Analisa bahwa terdakwa XXXX selaku Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX periode 2013 sampai dengan 2019, dalam rentang waktu dalam tahun 2017 sampai 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 170.620.867,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa XXXX dan selaku Penanggung jawab Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa XXXX telah melaksanakan Dana Desa XXXX Tahap I Tahun 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 170.620.867,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) Dimana dalam pengelolaan Dana Desa XXXX terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya dan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai akibat dari perbuatan terdakwa menggunakan dana desa untuk kepentingan sendiri.

Analisis Hukum:

Dalam hukum pidana, perumusan delik tindak pidana terbagi menjadi dua jenis yaitu delik formil dan delik materiil. Delik formil menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain, undang undang melarang melakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan konsekuensi apa pun dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, suatu delik formil dianggap telah selesai apabila pelakunya telah menyelesaikan rangkaian perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik. Sementara delik materiil menekankan pada akibat yang dilarang, pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu, akibat tidak merupakan syarat selesainya delik. Akibat harus ada dalam delik materiil. Akibat yang dilarang dalam rumusan delik harus benar benar terjadi sebelum delik materiil dianggap selesai. Jika pelaku telah melakukan seluruh atau rangkaian perbuatan yang diperlukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi karena suatu hal akibat yang dilarang tidak terjadi, delik hanyalah percobaan.¹⁸

Dilakukan dalam keadaan tertentu Setiap orang, menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah "setiap orang" yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hukum pidana, "setiap orang" dapat berarti baik badan hukum (*Rechtspersoon*) maupun orang perorangan (*Persoonlijkheid*). Dalam konteks Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, para koruptor dapat berasal dari korporasi baik lembaga berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum atau siapa saja, baik itu pegawai negeri, tentara, masyarakat, pengusaha, dan sebagainya, selama mereka memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut. Sesuai dengan studi kasus pada penelitian ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX yang menjadi subjek hukumnya adalah XXXX yang merupakan orang perorangan dan sudah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam unsur setiap orang dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor.

Pertama, memperkaya diri sendiri, dimana pelaku menikmati peningkatan kekayaan atau harta benda sebagai akibat dari perbuatan melawan hukumnya. Kedua, memperkaya orang lain, di mana ada orang lain yang menikmati peningkatan kekayaan atau harta benda sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum pelaku, sehingga yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Ketiga, memperkaya korporasi, di mana pelaku adalah kumpulan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum memperoleh keuntungan yang sama. Sesuai dengan studi kasus pada penelitian ini, berdasarkan

---

¹⁸ Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Henny Juliani, (2017), Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 1, hlm. 5 Terdapat dalam: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> diakses pada 18 Januari 2024

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/PID.SUS-TPK/2020/PN SMG, XXXX selaku kepala desa XXXX melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan membayarkan hanya Sebagian untuk kepentingan kegiatan pekerjaan fisik dana desa XXXX Tahap I dan menguasai sendiri dana desa sebesar Rp. 170.620.867,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Sebelum berbicara tentang frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", penting untuk mempelajari arti kata "merugikan". Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, Pasal 1 angka 22 menyatakan: kerugian negara adalah "kekurangan uang, barang, dan surat berharga yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian". Kata "merugikan" berarti menjadi rugi, menurun, atau merosot. Oleh karena itu, arti dari frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" adalah menjadi rugi, berkurang, atau menurunnya perekonomian negara.¹⁶⁰ Sesuai dengan studi kasus pada penelitian ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/PID.SUS-TPK/2020/PN SMG, XXXX selaku kepala desa XXXX dan selaku Penanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa XXXX telah melaksanakan Dana Desa XXXX Tahap I Tahun 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu membangun fasilitas desa XXXX. Akibat dari perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 170.620.867,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Dilansir dalam bagian yang sudah menjadi satu kesatuan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg, disebutkan bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Subsidair yaitu yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXX berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta Pidana Denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 170.620.867,00

(seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Dalam hal ini yang menjadi masalah menurut penulis adalah Jaksa sebagai Penuntut Umum mendakwa XXXX selaku terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa menggunakan dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sering mendakwa terdakwa dengan ketentuan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Terkadang kedua Pasal tersebut didudukkan sebagai dasar dakwaan subsidair satu terhadap yang lain dan kadang-kadang yang satu didudukkan menjadi dasar dakwaan alternatif terhadap lainnya. Sebenarnya dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tidak dituliskan bahwa dalam isinya pasal tersebut hanya untuk pegawai non pemerintahan. Dalam hal ini mengingat bahwa dakwaan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dimana yang menjadi subjek dalam Pasal ini adalah korporasi atau pegawai non pemerintahan sementara dalam kasus ini yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi adalah seorang Kepala Desa yang merupakan Aparatur Sipil Negara.

Sehingga menurut penulis, dalam hal dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tidak tepat karena ada ketentuan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi yang lebih khusus, sesuai dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis maka yang khusus akan mengalahkan yang umum. Yang khusus ada dalam ketentuan Pasal 3 karena spesifik berbicara tentang orang yang memiliki kewenangan, jabatan, dan kedudukan. Dalam putusan ini memang Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Subsidair yang telah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena memang dari segi unsur-unsur lebih memenuhi ketentuan Pasal 3 UU Tipikor dimana Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa yang merupakan Aparatur Sipil Negara. Namun, dalam hal ini penulis memandang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) bertentangan dengan teori kepastian hukum dimana tidak adanya kepastian padahal sudah jelas bahwa seorang Aparatur Sipil Negara didakwa dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Maka dari itu sesuai dengan teori kepastian hukum yang penulis pakai dari Fence M. Wantu yang mengatakan bahwa apabila hukum tidak memiliki nilai kepastian, hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi semua umum.

Conclusion

1. Pengertian ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam UU Tipikor, kata "dapat" dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menurut keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia no.25/PUU-XIV/2016. Karena itu, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi telah berubah menjadi delik materiil daripada delik formil.
2. Bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana pada Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN SMG dalam ketentuan Pasal 2 tidak terpenuhi karena terdakwa yang jabatannya adalah seorang kepala desa XXXX. Berdasarkan unsur "secara melawan hukum" masih sangat luas pengertiannya. Sementara unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lebih spesifik dan lebih tepat yaitu unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dan pada pokoknya Terdakwa XXXX memangku jabatan atau kedudukan selaku kepala desa XXXX serta memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengelola keuangan Desa XXXX tetapi dalam praktiknya, Terdakwa melakukan penyimpangan dengan tidak menyerahkan dana desa untuk Pembangunan sarana dan prasarana desa tetapi menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi.

References

- Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Henny Juliani, (2017), Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 5 Terdapat dalam: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> diakses pada 18 Januari 2024.
- Doni E. Saputra, 2018, Implikasi Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18
- Fatkurohman. 2017. Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV 2016. *Jurnal Konstitusi*. Volume 14 Nomor 1. Hlm. 10 Available from: <https://doi.org/10.31078/jk1411>.
- Kadir Yusrianto dan Roy Marthen Moonti. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS*. Vol. VI Nomor 3. Hlm. 431. Terdapat dalam: <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583> diakses 20 Juni 2023

Kiki Kristanto, (2019), Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. Volume 4 Nomor 2, hlm. 566 Terdapat dalam: <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/82> diakses pada 5 Juni 2024.

Novendri M Nggilu. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. *Lambung Mangkurat Law Journal*. Volume 5 Issue 2. Hlm. 109-121. Terdapat dalam: <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/>, diakses tanggal 30 November 2023.

Pujiyono. (2017). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25-PUU/XIV/2016 Terhadap Pergeseran Konsep Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. (Master Thesis). Data Base (ID Code No. 61632) Terdapat dalam: <http://eprints.undip.ac.id/61632/>

Rixy Fredo Soselisa, 2015, Suatu Kajian Tentang Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Volume 4 Nomor 5, hlm. 64 Terdapat dalam: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/9008/8562>, diakses pada 18 Januari 2024

Taufiqurrahman dan E. Bali. (2021). Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rectum*. Vol. 3 No. 1. Hlm. 121-122. Terdapat dalam: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.824> diakses 20 Juni 2023.

Tri Novita Sari Manihuruk. (2019). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar". *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 1 No. 1. hlm. 86. Terdapat dalam: <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2895>, diakses 20 Juni 2023.

Willy Medi C. Nababan, 2023, "Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat", (diakses pda 06 Juni 2023, Pukul 19:32) Terdapat dalam: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/rawan-korupsi-pengawasan-dana-desa-harus- diperkuat>, diakses 20 Juni 2023

Yessy Paramita Samadi. 2015. Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Volume 4 Nomor 2, hlm. 2 Terdapat dalam: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7780> diakses pada 25 Juni 2024.